



OPTIMALISASI PEMBANGUNAN KEMARITIMAN NASIONAL

T. Ade Surya*)

Abstrak

Pembangunan dan pengembangan sektor maritim menjadi salah satu visi dan misi utama pemerintahan Jokowi. Dengan potensinya yang sangat besar, keberhasilan mewujudkan sektor maritim yang bernilai ekonomi tinggi akan berpengaruh positif terhadap pemerataan ekonomi. Dibutuhkan banyak upaya untuk dapat mewujudkan sektor maritim yang handal yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya maksimal dan melakukannya secara terencana, sistematis, dan terukur agar pembangunan dan pengembangan ekonomi maritim ini dapat terlaksana dengan baik.

Pendahuluan

Setelah dilantik pada 20 Oktober 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mulai bekerja untuk mencapai visi dan misi yang diutarakan pada masa pemilihan presiden beberapa bulan lalu. Salah satu visi dan misi yang menjadi prioritas untuk diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi adalah membangun dan mengembangkan sektor maritim dengan menjadikan ekonomi maritim sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Keseriusan membangun dan mengembangkan sektor maritim tersebut ditunjukkan pemerintahan Jokowi dengan membentuk satu kementerian koordinator baru di kabinetnya, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Namun demikian, perlu juga diperhatikan, apakah program pembangunan dan pengembangan sektor maritim pemerintahan Jokowi ini sejalan dengan program pemerintahan sebelumnya, yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal ini sangat penting karena program-program dalam MP3EI sebagian besarnya sudah berjalan. Diperlukan adanya sinergitas dan kontinuitas program sehingga membuat program-program percepatan pembangunan dalam MP3EI, khususnya yang terkait dengan sektor kemaritiman tidak sia-sia.

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: teuku.surya@dpr.go.id



Pembangunan dan pengembangan sektor maritim menjadi prioritas pemerintahan Jokowi karena selama ini pembangunan ekonomi Indonesia hanya terfokus dan bertumpu pada pembangunan ekonomi di daratan saja. Padahal jika dilihat dari sisi potensinya, sektor maritim Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang sampai saat ini baru sekitar 20 persen saja yang berhasil dimanfaatkan. Itupun baru terfokus pada bidang perikanan. Apabila potensi sektor maritim ini dapat dikelola dan dimaksimalkan oleh pemerintah, tentunya dapat memberikan nilai tambah yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional. Pembangunan dan pengembangan sektor maritim diyakini dapat memicu pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk kawasan Indonesia Timur yang selama ini jauh tertinggal.

Potensi Sektor Maritim Indonesia

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas dua per tiganya terdiri atas lautan dan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam. Kekayaan laut tersebut berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui (perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumber daya alam yang tak dapat diperbarui (minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*), dan jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.

Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8 persen dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/tahun). Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun. Namun demikian, hingga tahun 2011 kita baru memanfaatkan potensi budidaya laut ini sebesar 4,6 juta ton (10,95 persen). Lahan pesisir yang sesuai untuk usaha budidaya tambak udang, bandeng,

kerapu, nila, kepiting, rajungan, rumput laut, dan biota perairan lainnya diperkirakan lebih dari 1,2 juta ha dengan potensi produksi sekitar 10 juta ton/tahun.

Lebih dari itu, Indonesia memiliki keanekaragaman genetik, spesies, maupun ekosistem laut tertinggi di dunia yang dikenal sebagai *mega-marine biodiversity*. Secara potensial, nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi kelautan Indonesia diperkirakan sekitar Rp984 triliun per tahun. Meskipun belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari, namun jika kita membandingkan dengan negara bagian Queensland Australia dengan panjang garis pantai hanya sekitar 9.800 km tetapi mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar Rp24 triliun per tahun. Dengan demikian, potensi ekonomi pariwisata bahari Indonesia sangatlah besar.

Sementara itu, hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi kita berasal dari kawasan pesisir dan laut. Berdasarkan data geologi diketahui Indonesia memiliki 60 cekungan potensi yang mengandung minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan tersebut, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 berada di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya 6 saja yang berada di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan mempunyai potensi sebesar 11,3 miliar barel yang terdiri atas 5,5 miliar barel cadangan potensial dan 5,8 miliar barel berupa cadangan terbukti. Selain itu diperkirakan cadangan gas bumi adalah 101,7 triliun kaki kubik yang terdiri dari cadangan terbukti 64,4 triliun dan cadangan potensial sebesar 37,3 triliun kaki kubik.

Potensi ekonomi bisnis jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar Rp168 triliun per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir kita mengeluarkan devisa sekitar Rp168 triliun untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97 persen dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50 persen dari total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia. Sementara itu di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar, dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya.

Potensi ekonomi ini akan menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis,

seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad ke-20 sebenarnya telah bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75 persen dari barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makasar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar Rp15.600 kuadriliun setiap tahunnya.

Dengan begitu besarnya potensi sektor maritim Indonesia, maka akan sangat disayangkan jika potensi ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Keberhasilan memanfaatkan potensi sektor maritim secara maksimal dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang saat ini melambat karena pengaruh situasi global. Namun untuk mewujudkan sektor maritim yang maju tidak akan mudah, karena ini merupakan pekerjaan besar yang butuh perencanaan matang dan usaha keras. Pemerintah sebaiknya membuat suatu masterplan yang memuat perencanaan sistematis dan target pembangunan dan pengembangan sektor maritim untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan demikian, pemerintah dapat dengan mudah mengukur pencapaian program ini, sekaligus mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaannya.

Upaya Pembangunan dan Pengembangan Sektor Maritim Indonesia

Dalam upaya membangun dan mengembangkan sektor maritim, pemerintahan Jokowi membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman yang menaungi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan. Keberadaan Kementerian Koordinator Kemaritiman ini sangat penting untuk dapat mewujudkan sektor maritim yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Koordinasi antar kementerian diperlukan agar program-program pembangunan dan pengembangan sektor maritim dari masing-masing kementerian di bawah naungan Kementerian Koordinator Kemaritiman dapat bersinergi dengan baik dan tidak saling tumpang tindih.

Untuk dapat membangun dan

mengembangkan sektor maritim, khususnya ekonomi maritim, pemerintah harus lebih dulu membangun industri pendukung sektor maritim. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Ina Primiana, untuk mengembangkan sektor maritim pemerintah harus memulai dari wilayah Indonesia Timur karena wilayah ini memiliki banyak potensi sumber daya alam yang berasal dari laut. Jika program pengembangan sektor maritim berkembang maka biaya logistik menjadi semakin murah karena banyaknya permintaan ke wilayah Indonesia Timur. Untuk itu pemerintah harus membuat *road map* untuk merealisasikan pengembangan sektor maritim. Seperti penentuan industri-industri apa saja yang akan tumbuh di Indonesia Timur. Kemudian setelah penentuan industri, perlu dibangun infrastruktur penunjang agar para investor tertarik menanamkan modalnya.

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan, termasuk pembangunan dan pengembangan di sektor maritim. Bentuk kesiapan infrastruktur untuk menunjang pembangunan sektor maritim salah satunya adalah dengan membangun dan membenahi fungsi kepelabuhan di pusat-pusat ekonomi. Pelabuhan dapat menciptakan konektivitas maritim yang berfungsi sebagai alur interaksi ekonomi maupun interaksi pada bidang-bidang lainnya. Jika hal ini diterapkan, tentunya akan sejalan dengan program percepatan pembangunan di MP3EI. Dalam MP3EI, penguatan konektivitas nasional dan internasional merupakan salah satu program utama yang dikedepankan. Oleh karena itu, sinergitas program pembangunan dan pengembangan sektor maritim dengan program penguatan konektivitas antar wilayah harus dilakukan, dalam rangka memanfaatkan posisi Indonesia yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian regional dan global.

Selain membangun industri pendukung, pembenahan terhadap sejumlah permasalahan mendasar di sektor kelautan perlu dilakukan agar dapat mempercepat pengembangan sektor maritim. Pakar kelautan dari Universitas Pattimura, Alex Retraubun, menyatakan bahwa permasalahan mendasar sektor kelautan adalah kemandirian. Kemandirian harus

menjadi urat nadi pengelolaan kelautan dengan memberdayakan sumber daya kelautan dan perikanan, serta mengurangi ketergantungan impor. Permasalahan lainnya adalah kemampuan pengawasan. Industri kelautan dan perikanan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga akibat lemahnya teknologi, sarana pengawasan, dan ketahanan nelayan.

Program pembangunan dan pengembangan sektor maritim adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di sektor ekonomi. Banyak upaya lainnya yang harus dilakukan selain upaya-upaya di atas agar program prioritas pemerintah ini dapat berhasil, diantaranya adalah penguatan kompetensi SDM dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kelautan. Namun pemerintah juga harus memperhatikan secara serius dari sisi ketersediaan anggaran. Anggaran yang dibutuhkan untuk mensukseskan program ini akan sangat besar, sedangkan pemerintah juga tidak bisa lepas tangan terhadap program-program di bidang lainnya. Untuk itu pemerintah harus dapat secara bijak menjalankan program ini dengan terencana, sistematis, dan terukur.

Penutup

Sebagai salah satu program utama dalam visi dan misi pemerintahan Jokowi, pembangunan dan pengembangan sektor maritim menjadi pondasi untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Hal ini sangat dimungkinkan karena potensi yang dimiliki sektor maritim Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Perencanaan pembangunan dan pengembangan sektor maritim perlu dilakukan sebaik mungkin karena banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, termasuk infrastruktur dan industri pendukungnya, di mana membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dukungan penuh dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya juga sangat dibutuhkan. Sebagai negara kepulauan, sudah seharusnya Indonesia mampu mengoptimalkan dan mengandalkan ekonomi maritim sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan anggaran, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta,

asalkan pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi pihak swasta tersebut untuk berinvestasi. Selain itu, pemerintah juga harus meminta dukungan dari DPR RI terkait ketersediaan anggaran agar program ini dapat berjalan.

DPR RI, sebagai lembaga negara yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan, harus mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sektor maritim. Selain itu, diharapkan DPR RI juga dapat mendukung dan menguatkan program utama pemerintah ini agar kemandirian dan pemerataan ekonomi dapat segera terwujud.

Referensi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*.

“Fokus pada Produksi dan Jasa: Pelaku Industri Maritim Perlu Diperkuat”, *Harian Kompas*, 22 Oktober 2014.

“Indonesia Harus Jadi Negara Maritim”, *Harian Ekonomi Neraca*, 21 Oktober 2014.

“Bangun Sektor Maritim, Jokowi Harus Siapkan Industri dan Infrastruktur maritim”, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1202410-bangun-sektor-maritim-jokowi-harus-siapkan-industri-dan-infrastruktur-maritim/>, diakses tanggal 25 Oktober 2014.

“Penguatan Ekonomi Maritim Bisa Menjadi Pemicu Pemerataan di Indonesia”, <http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/217594-penguatan-ekonomi-maritim-bisa-menjadi-pemicu-pemerataan-di-indonesia.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2014.

“Potensi Ekonomi Maritim Indonesia”, <http://jurnalmaritim.com/2013/16/129/potensi-ekonomi-maritim-indonesia>, diakses tanggal 25 Oktober 2014.

“Rokhmin Dahuri: 80 Persen Potensi Maritim Indonesia Belum Terjamah”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/12/rokhmin-dahuri-80-persen-potensi-maritim-indonesia-belum-terjamah>, diakses tanggal 27 Oktober 2014.